

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
PANITIA PENGUJI TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian	12
3.1. Tujuan Umum	12
3.2. Tujuan Khusus	12
4. Manfaat Hasil Penelitian	13
5. Kajian Pustaka	13
5.1. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara	13
5.2. Keputusan Presiden Sebagai Obyek Sengketa ..	29
5.3. <i>Ius Standi</i> LSM Lingkungan	34
6. Metode Penelitian	42
6.1. Pendekatan Masalah	42
6.2. Sumber Bahan Hukum	43
6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	43
6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	43
7. Sistematika	45

**BAB II. FIGUR HUKUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1994
TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG
NUSANTARA 47**

1. Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Tata Usaha
Negara, dan Keputusan Tata Usaha Negara Yang
Merupakan Perbuatan Hukum Perdata 48

1.1. Karakteristik Peraturan Perundang-undangan ... 48

1.2. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara ... 54

1.3. Karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara
yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata 67

2. Sumber Kewenangan, Prosedur dan Substansi
Keputusan Presiden 75

2.1. Sumber Kewenangan Keputusan Presiden 76

2.2. Prosedur Pembuatan Keputusan Presiden 85

2.3. Substansi Keputusan Presiden 89

3. Tinjauan dan Analisis Terhadap Obyek Sengketa
Dalam Kasus Dana Reboisasi 94

3.1. Tinjauan Terhadap Obyek Sengketa Dalam Kasus
Dana Reboisasi 94

3.2. Analisis Terhadap Obyek Sengketa Dalam Kasus
Dana Reboisasi 101

4. Kualifikasi dan Keabsahan Keputusan Presiden
No. 42 Tahun 1994 114

4.1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994
Sebagai KTUN Tidak Terikat Berdasarkan Sumber
Kewenangan Atribusi 115

4.2. Prosedur dan Substansi Keputusan Presiden
No. 42 Tahun 1994 Merugikan Kepentingan
Lingkungan 119

BAB III. KUALITAS DAN KEPENTINGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINGKUNGAN SEBAGAI PENGUGAT MELALUI BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	129
1. Pengertian Dan Bentuk Organisasi LSM Lingkungan ..	130
1.1. Pengertian LSM Lingkungan	130
1.2. Bentuk Organisasi LSM Lingkungan	135
1.3. Yayasan Sebagai Bentuk Organisasi LSM Lingkungan	139
2. Kepentingan LSM Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan	142
2.1. Mewakili Kepentingan Masyarakat Dalam Menegakkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat	143
2.2. Mewakili Kepentingan Masyarakat Untuk Menjadi Mitra Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan	152
2.3. Kemampuan LSM Lingkungan Dalam Mewakili Kepentingan Masyarakat	156
3. Kriteria Kepentingan LSM Lingkungan Dalam Mengajukan Sengketa Ke Pengadilan Tata Usaha Negara	157
3.1. Berbentuk Badan Hukum	162
3.2. Memiliki Tujuan Sebagai Tolok Ukur	163
3.3. Bersifat Representatif	164
3.4. Kegiatan Nyata Yang Sejalan Dengan Fungsinya	164
4. Tinjauan dan Analisis Terhadap Penolakan Dan Pengakuan Keenam LSM Sebagai Penggugat Dalam Kasus Dana Reboisasi	166
4.1. Tinjauan Terhadap Kualitas dan Kepentingan Penggugat Dalam Kasus Dana Reboisasi	166

4.2. Analisis Terhadap Kualitas dan Kepentingan Penggugat Dalam Kasus Dana Reboisasi	170
BAB IV. P E N U T U P	180
1. Simpulan	180
2. Saran	182
 DAFTAR PUSTAKA	 185
LAMPIRAN	194